

## EFEKTIVITAS SOSIALISASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI PILKADA 2024 KOTA BENGKULU

Julita <sup>1)</sup>; Dhika Alfatah<sup>2)</sup> ; Faridah <sup>3)</sup>

<sup>1)2)3)4)</sup> Program of Public Administration Public

<sup>1)2)3)</sup> Department of Administration Publik, STIA Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [julita@gmail.com](mailto:julita@gmail.com); <sup>2)</sup> [dhikaalfatah8@gmail.com](mailto:dhikaalfatah8@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received [11 November 2024]

Revised [16 Desember 2024]

Accepted [30 Januari 2025]

### KEYWORDS

Efektivitas., Partisipasi, Pilkada, Kota Bengkulu

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menghadapi Pilkada 2024 Kota Bengkulu. Sampel dalam penelitian ini adalah Komisioner KPUD, Ketua PPK, Anggota PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Masyarakat Kota Bengkulu Metode pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian didapatkan bahwa. Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya dengan adanya sosialisasi dari pihak KPUD baik dari komisioner KPU, PPK dan PPS kepada seluruh kalangan masyarakat, dimana sosialisasi yang diberikan memiliki materi, presentator, sistem (cara), sasaran, media waktu dan tempat. Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat ikut berpartisipasi dalam melakukan pemilihan umum kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak suara sehingga mereka memberikan hak suara mereka dengan ikut serta memilih sesuai dengan pilihan hati nurani mereka, hal demikian membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan dalam menghadapi pilkada sudah efektif dimana efektivitas sosialisasi komisi pemilihan umum. cara memberikan suara, calon dan partai politik ajakan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan presentator, sistem (cara), sasaran, media waktu dan tempat dalam bersosialisasi

### ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effectiveness of socialization in increasing community participation in facing the 2024 Pilkada in Bengkulu City. The sample in this study were the KPUD Commissioner, PPK Chairperson, PPK Members, PPS Chairperson, PPS Members and the Bengkulu City Community. Data collection methods with primary data and secondary data. Data analysis techniques with data reduction, data presentation and conclusions. The results of the study showed that. The results of the study obtained by the researcher were that with the socialization from the KPUD both from the KPU, PPK and PPS commissioners to all levels of society, where the socialization provided had material, presenters, systems (methods), targets, media time and place. With this socialization, the community participates in conducting general elections, public awareness of the importance of voting rights so that they exercise their voting rights by participating in voting according to their conscience, this proves that the socialization carried out in facing the regional elections has been effective where the effectiveness of the socialization of the general election commission can, , , candidate selection, voting for candidates and political parties, election dates, how to vote, candidates and political parties, invitations to increase public knowledge, understanding and awareness of the rights and obligations in the election of presenters, systems (methods), targets, media, time and place in socializing.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Partisipasi pemilih dalam Pilkada Langsung pada dasarnya memiliki positioning yang krusial, hal ini disebabkan sebuah pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilihan akan berdampak secara politis terhadap legitimasi karena faktor partisipasi publik. Jadi, apabila tingkat partisipasi pada sebuah Pilkada sangatlah rendah atau kurang dari setengah jumlah total pemilih, tentu hasilnya kurang merepresentasikan dari keterwakilan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam beberapa tahun terakhir, KPU Kota Bengkulu telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Salah satu contoh adalah dengan melakukan sosialisasi melalui kirab, yang dilaksanakan sejak 16 Agustus hingga 23 Agustus 2023. Dalam kegiatan ini, KPU Kota Bengkulu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Pemilu 2024, seperti pengetahuan warna surat suara, cara mencoblos agar suara sah, dan berbagai pengetahuan pemilu lainnya. (Mayasari : 2023.) Meningkatkan partisipasi berarti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik. Dalam mewujudkan semua itu tentunya membutuhkan peranan seorang praktisi kehumasan dan juga sebuah strategi. Tentunya dalam kaitan ini, strategi yang matang dan tepat sasaran sangat diperlukan oleh Humas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu, strategi juga dibutuhkan untuk dapat merealisasikan tujuan dari sebuah lembaga dalam bentuk merencanakan strategi program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diperuntukkan bagi seluruh segmentasi masyarakat dalam bentuk kegiatan yang memberikan dampak nyata sesuai dengan yang diinginkan maka strategi yang digunakan.

Namun, meskipun sosialisasi KPU memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, masih terdapat berbagai kendala dan tantangan yang perlu diatasi. Mulai dari keterbatasan sumber daya, hingga rendahnya tingkat kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sosialisasi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum. Banyaknya fenomena di kalangan masyarakat ketika datang masa pilkada dan praktek money politik yang dilakukan oleh para calon, kepala Masyarakat. Hal ini dikarenakan penyelenggara maupun peserta pemilu selalu mencari celah agar calon yang didukungnya memenangkan meskipun dengan cara-cara yang tidak fair. dan elegan, ditambah lagi sikap ambigu dari masyarakat enggan melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu. Bawaslu mencatat bahwa kasus money politik itu tidak hanya terjadi pada masa kampanye, tetapi juga terjadi pada masa terlarang kampanye, yakni pada masa tenang. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi timbulnya kecurangan-kecurangan pemilu perlu dilakukan tindakan antisipatif oleh pengawas pemilu, dalam penyelenggara pemilu masyarakat memilih bukan berdasarkan hati nurani yang sesuai dengan kapasitas dan elektabilitas dari calon legislatif tapi berdasarkan asas kedaerahan tetapi karena mendapatkan uang dari anggota tersebut.

## LANDASAN TEORI

### Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Sugiyono (2011: 23) adalah sebagai berikut : *"effectiveness is concerned with the accomplishment of explicit or implicit goal"*. Artinya efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara *ekxplisit* maupun *implisit*, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai" Tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumberdata tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu. (Siagian, 2017:151). Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. (Mardiasmo, 2017:111) Efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Sesuatu organisasi barangkali bisa efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut. (Ahadi, 2010:3)

Berdasarkan pengertian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran terhadap keberhasilan penyelesaian suatu pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, biaya, tenaga dan alat-alat atau sumber daya yang ada dan tersedia untuk dipergunakan didalam mencapai tujuan tersebut, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan sasaran atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan pada akhirnya akan kembali lagi kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapainya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Menurut pendapat (Edy Sutrisno, 2015:125) Ada tujuh variabel yang mempengaruhi organisasi terhadap Efektivitas yaitu:

1. Struktur
2. Teknologi yaitu perbuatan, pengetahuan, teknis dan peralatan fisik yang digunakan untuk mengubah input menjadi output, barang atau jasa
3. Lingkungan eksternal
4. Lingkungan internal
5. Keterkaitan karyawan pada organisasi
6. Prestasi karyawan
7. Kebijakan manajemen.

### **Sosialisasi**

Supaya lebih memahami apa arti sosialisasi, berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli tentang sosialisasi:

1. Soejono Dirdjosisworo  
Soejono Dirdjosisworo mengungkapkan bahwa pengertian sosialisasi memuat tiga arti, yaitu: Proses belajar; yaitu suatu proses akomodasi dimana manusia menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya. Kebiasaan; dalam bersosialisasi setiap manusia mempelajari sikap, ide-ide, kebiasaan, pola-pola nilai dan tingkah laku, serta ukuran kepatuhan tingkah laku di dalam masyarakat di lingkungan ia hidup. Sifat dan kecakapan; proses sosialisasi mengajarkan manusia untuk merangkai dan mengembangkan dari semua sifat dan kecakapan sebagai suatu kesatuan dalam diri seseorang.
2. Charlotte Buhler  
Menurut Charlotte Buhler, pengertian sosialisasi merupakan suatu proses belajar dan menyesuaikan diri untuk membantu anggota masyarakat dalam memahami bagaimana bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya. Ia juga berpendapat bahwa sosialisasi bertujuan agar anggota masyarakat dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut.
3. Peter L. Berger  
Menurut Peter L. Berger, pengertian sosialisasi merupakan suatu proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat.
4. Edward S. Greenberg  
Menurut Greenberg, pengertian sosialisasi merupakan suatu proses perubahan dari individu untuk diterima atau sesuai dengan keinginan dari pihak luar dunia luar. Hal itu bertujuan agar ia dapat ikut serta berpartisipasi secara aktif sebagai anggota suatu organisasi.
5. Martin Gibson  
Menurut Gibson, pengertian sosialisasi adalah sebuah aktivitas mewujudkan dan mengintegrasikan dari organisasi demi tujuan organisasi maupun individu. Dua pengertian yang dilontar Gibson sangat tampak jelas bahwa individu yang bersosialisasi memiliki dua kepentingan yang berbeda, yakni kepentingan individu dan kepentingan organisasi.

6. Robert M. Z. Lawang

Menurut Robert M. Z. Lawang, pengertian sosialisasi merupakan proses mempelajari dan memahami norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan guna kemungkinan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial.

7. Karel J. Veeger

Menurut Karel J. Veeger, pengertian sosialisasi merupakan suatu proses belajar dan mengajar. Pendapat tersebut cukup sederhana, hal itu bisa dilihat ketika orang tua mendidik anaknya agar menaati tata krama dan berperilaku sopan santun.

8. Bruce J. Cohen

Menurut Bruce J. Cohen, pengertian sosialisasi merupakan proses seorang manusia dalam mempelajari sebuah nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pelajaran tersebut bertujuan agar seseorang menjadi bagian dari masyarakat. (Aris 2022)

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat difahami bahwa sosialisasi adalah suatu usaha untuk memberikan informasi tentang suatu kabar atau berita, memberikan informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat banyak sehingga masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menjadi anggota yang berprestasi dalam masyarakat. Landasan pokok yang dipakai dalam melaksanakan sosialisasi ialah seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang" (Tia Subekti, 2014). Salah satu Bab yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian empat unsur penting proses penyelenggaraan Pemilu, yaitu Pemilih, Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil, telah dipenuhi. Bentuk partisipasi masyarakat disebutkan dalam Pasal 246 tersebut adalah sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survey atau jejak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat (Quick Count) hasil Pemilu. (Ananda Hadi Elyas, 2020:140)

### Tinjauan Efektivitas Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum

Efektivitas sosialisasi merupakan kegiatan koordinasi dan kerjasama komisipemilihan umum (KPU) dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran atau tujuan telah dicapai dengan melihat dari adanya materi, persentator, sistem (cara), sasaran (target), media, waktu dan tempat dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi. Efektivitas sosialisasi komisipemilihan umum dapat dilihat dari adanya materi sosialisasi pilkada, persentatorsosialisasi pilkada, sistem (cara) sosialisasi pilkada, sasaran (target) sosialisasipilkada, media sosialisasi pilkada, waktu dan tempat sosialisasi pilkada. (Asri Fahrizal 2018:35)

### Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan warga negarasecara individu dalam kegiatan politik. Segala kegiatan warga negara yang mempengaruhi proses pembuatan sertapelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik. Partisipasi sebagai salah satu bentuk efek politik dari sosialisasi politik atau komunikasi politik. Kegiatan pemberian suara (voting) dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, sebab hal itu akan berhenti jika pemberian suara sudah terlaksana. Sedangkan orang-orang apatis merupakan mereka yang tidak berpartisipasi dalam proses politik, ini disebabkan oleh pilihan individu. (Arniti, 2020:329)

Adapun teori mengenai partisipasi ini diantaranya dapat dilihat pada penjelasan berikut : (Sulfitri Husain, 2023:37)

1. Sumarto, partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antara stakeholders sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberatif, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama terjadi.
2. Made Pidarta, partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.
3. Adisasmita mengatakan partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan, perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesedia dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implemementasi pembangunan.

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan

penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu

Sebagai negara yang menganut demokrasi partisipasi politik merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari konsep tersebut. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum, mengindikasikan tingkat pemahaman masyarakat sebagai warganegara untuk berpartisipasi dalam politik. Sebaliknya, jika partisipasi politik rendah mengindikasikan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses perpolitikan yang ada. Istilah "*participation*" merupakan pengertian dari partisipasi yang jika diartikan secara umum merupakan keterlibatan aktif masyarakat terhadap segala bentuk kegiatan. Dalam hal politik, partisipasi merupakan keikutsertaan ataupun aktifitas baik perorangan maupun kelompok dalam kegiatan politik. (Sulfitri Husain, 2023:37). Partisipasi politik dianggap sebagai cara bagi masyarakat untuk mengontrol pemerintahan melalui partisipasi politik mereka dalam Pemilu. Kendali yang diberikan bervariasi tergantung pada tingkat partisipasi politik individu. Pemenuhan hak politik warga negara terkait erat dengan partisipasi politik, yang merupakan bagian penting dari demokrasi. (Irsyad Sudirman and Imam Muazansyah, 2022:139) Oleh karena dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat baik dari kalangan muda sampai kalangan lanjut usia dimana sebagai warga negeri. Partai politik sering menggunakan keberadaan pemilih pemula sebagai target untuk mendapatkan suara, dan pemilih pemula biasanya tidak memahami politik dengan baik. Oleh karena itu, partai politik mencoba mempengaruhi pilihan politik pemilih pemula dengan berbagai cara. Untuk menghindari berbagai kepentingan yang memanfaatkan situasi saat ini, sangat penting untuk memberikan pelatihan hukum tentang pemilihan umum kepada pemilih pemula. (Vena Savera Syukriah, 2023:1760)

Meningkatnya partisipasi dalam negara menunjukkan bahwa masyarakat peduli dan memahami perannya dalam mengatur negara. Dalam pemilihan umum, partisipasi politik dapat diukur dari berapa banyak pemilih yang memilih untuk tidak memilih. Pemilih disini adalah warga negara yang memenuhi persyaratan untuk memilih pemimpin untuk menjadi pemegang kekuasaan. Tidak terkecuali bagi pemilih pemula sebagai pemilih yang memasuki pemilihan umum untuk pertama kali memilih. Terdapat faktor-faktor yang mendorong pemilihan pemilu untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik, yaitu:

1. Kepekaan seseorang terhadap isu-isu politik, yang dapat muncul melalui kontak pribadi atau organisasi, ketika seseorang tersebut terinspirasi untuk berpartisipasi dalam politik melalui aktif dalam suatu organisasi atau melihat media;
2. Mengetahui karakteristik sosial yang mempengaruhi partisipasi politik, meskipun status pemilih pemula berbeda-beda, namun banyak yang memperlakukan hak politiknya;
3. Sistem kepartaian dan system politik negara mempengaruhi dinamika pemilih pemula;
4. Perbedaan wilayah mempengaruhi perbedaan perilaku individu. Pemungutan suara menghasilkan pemilih pemula yang berpartisipasi tanpa paksaan karena preferensi pribadi. (Putri Ulandari, 2023:6)

Terdapat beberapa penyebab adanya permasalahan dalam partisipasi pemilih pemula yaitu mereka tidak menggunakan hak pilihnya, yaitu ada beberapa faktor, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor teknis, ialah adanya kendala teknis yang dialami oleh pemilih sehinggamenyebabkan untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti pada hari pencoblosan pemilih sedang sakit, ada pekerjaan, ataupun kegiatan lainnya.
2. Faktor politik, faktor ini merupakan alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti tidak punya pilihan dan kandidat percayabawa pemilu in akan membawa perubahan dan perbaikan, dan adanya ketidak percayadengan partai. Kondisi tersebut yang menjadi pendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Selain itu, terdapat berita negative yang menerpa para wakil rakyat, yang notabene adalah para politisi, sedikit banyak berkonflik mulai dari konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi yang berbeda partai.
3. Faktor sosialisasi, sosialisasi atau penyebarluasan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir adanya golput. Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda.
4. Faktor administrasi, merupakan faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bias menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP).

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkhusus para pemilih pemula dalam pemilu ini, Muh Isnaini mengemukakan pendapat, yaitu :

1. Pendidikan Politik Rakyat

Istilah pendidikan politik sering disamakan dengan istilah political socialization, yang secara harfiah bermakna sosialisasi politik. Sosialisasi politi dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi

politi. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam system politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

## 2. Memaksimalkan Partai Politik

Tujuan partai politik adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan atau mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menyatakan bahwa partai politik mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi warga negara Indonesia.
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender

## Konsep Pilkada

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Asas-asas pemilu terdiri dari 6 asas, hal ini sesuai dengan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2003. Keenam asas tersebut sering disingkat dengan "LUBER JURDIL" yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Perlu disadari bahwa salah satu elemen Pemilu yang berintegritas adalah penyelenggara Pemilu yang berintegritas. Sudah menjadi kewajiban KPU untuk memberikan informasi ataupun sosialisasi tentang "kehormatan" menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu sendiri. Kehormatan disini adalah apa yang dilakukan saat ini, tidak lain adalah ikut menentukan nasib bangsa ataupun daerahnya. KPU bisa dengan lebih masif memberikan sosialisasi ini kepada masyarakat dengan turun langsung hingga level desa untuk menjangkau sumberdaya yang kompeten untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu. Demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem politik demokrasi, yaitu :

1. Adanya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala.
2. Adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif.
3. Adanya perlindungan terhadap HAM.
4. Berkembangnya *civil society* dalam masyarakat. (Ananda Hadi Elyas 2020:142)

Hadenis dalam Wirdasari (2015:28), mengatakan bahwa pemilihan, termasuk pemilihan kepala daerah langsung disebut demokratis kalau memiliki "makna". Istilah "bermakna" merujuk pada tiga kriteria, yaitu (1) keterbukaan, (2) ketepatan, (3) keefektifan pemilu. Ketiga kriteria tersebut harus dipenuhi bukan hanya pada saat pemungutan suara saja, melainkan juga sewaktu dilaksanakan kampanye dan perhitungan suara. Akhirnya, kriteria itu juga berarti kepala daerah dipilih benar-benar akan menduduki jabatannya. Asas yang digunakan dalam pilkada langsung sama persis dengan asas yang dipakai dalam pemilu, yakni langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Menurut Pramusinto dalam Wirdasari (2015: 28), asas-asas tersebut dapat dikatakan bahwa pilkada langsung di Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam rekrutmen pejabat publik atau pejabat politik yang terbuka.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan, akhirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota resmi berlaku pada tanggal 18 Maret 2015. Di dalam Undang-Undang ini terdapat tidak banyak perubahan peraturan yang mengatur tentang pemilihan kepada daerah. Pada pasal 7 dalam Undang-Undang ini sangat jelas termuat tentang persyaratan menjadi kepala daerah. Lalu pada pasal lima ayat 3 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 dijelaskan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yaitu meliputi:

1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangancalon walikota dan wakil walikota;
2. Pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;

3. Penelitian persyaratan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
4. Penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
5. Pelaksanaan kampanye;
6. Pelaksanaan pemungutan suara;
7. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara;
8. Penetapan calon terpilih;
9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

## METODE PENELITIAN

### Metode Analisis

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian mengenai efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam menghadapi Pilkada 2024 Kota Bengkulu. Selain itu, untuk menganalisisnya menggunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana semestinya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku, sikap pandangan, perilaku individu dan kelompok orang. Pendekatan ini diarahkan kepada latar belakang individu kualistik menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberi gambaran realita yang kompleks dalam melihat Efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam menghadapi Pilkada 2024 Kota Bengkulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

menurut masyarakat melalui partisipasi mereka dapat memahami nilai dan norma politik serta meningkatkan kesadaran politik dikalangan masyarakat, menambah ilmu dalam dunia politik agar tidak salah dalam kegiatan tersebut, memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, lebih terinformasi tentang peristiwa dan isu terkini, menambah wawasan, relasi dan pengalamandengan bergabung dengan partai politik adalah salah satu cara untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik, dapat memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka sendiri serta kelompok mereka, memastikan bahwa suaramereka didengar dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan mengambil peran aktif dalam membentuk masyarakat yang lebih baik dapat mengembangkan keterampilan seperti kepemimpinan, komunikasi, negosiasi, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap saya maupun masyarakat seperti lebih memahami mekanisme pemilu sertamasyarakat dapat menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab membantu masyarakat memahami pentingnya partisipasi, politik dan pemilu, serta bagaimana proses politik mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, membantu menyukseskan pemilu, dan menjadi warga negara yang baik dengan ikut serta dalam menyukseskan pemilu, meningkatkan kesadaran politik dikalangan masyarakat dan ingin memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki kondisi sosial dan politik, dapat terlibat dalam politik untuk berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang dapat mempengaruhi banyak orang. Sosialisasi pemilu dan pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU sangat penting, karena melalui Pendidikan pemilu dapat membuat masyarakat menjadi cerdas dalam menentukan hak pilih dan dapat mengerti bahwa suara mereka sangatlah dibutuhkan bagi kemajuan bangsa ini, dengan mengikuti sosialisasi saya dapat membantu memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami, masyarakat lebih kritis dalam menyikapi informasi politik yang beredar dan dapat membedakan informasi yang benar atau salah. Amun tidak semua masyarakat yang memiliki pemikiran yang sama karena ada beberapa masyarakat yang tidak mau mengikuti sosialisasi dalam menghadapi pilkada ini dikarenakan tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam politik, dan terasa sangat rumit, meski mereka tidak mengikuti sosialisasi yang diberikan namun mereka tetap menggunakan hak pilih mereka dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih siapa saja yang menurut mereka pemimpin yang dapat dapat memajukan kkemakmuran rakyatnya terutama dalam pemilihan pemimpin daerah.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber bahwa efektivitas sosialisasi komisi pemilihan umum dapat dilihat dari adanya materi sosialisasi pilkada dimana materi sosialisasi pilkada terkait dengan dasar-dasar pemilu seperti pengertian dan pentingnya pemilu, proses pemilu, hak dan kewajiban pemilu, penjelasan tentang tahapan pemilu, termasuk pendaftaran pemilih, pemilihan calon, pemungutan suara kandidat dan partai politik, tanggal pemilu, cara memberikan suara, calon dan partai politik ajakan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan seperti bagaimana cara memilih, tahapan & jadwal pilkada, tanggal memilih, hak dan kewajiban pemilih, pendidikan pemilih pentingnya pemilihan dalam demokrasi, dampak golput dalam pilkada dan lain-lain mulai dari media sosial, cetak elektronik. Dimana tahapan sosialisasi pemilu adalah mensosialisasikan hari tanggal Pilkada 2024 dengan cara melakukan pendekatan keseluruhan masyarakat terutama basic muda dan berpartisipasi pada pilkada, sedangkan terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Bengkulu adalah seluruh stake holder, Pemda, Badan Adhoc, Tomas, Toga, OKP, Akademisi dan semua elemen lainnya

Balai sosialisasi pilkada wajib dan penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih, karena memberikan pengetahuan dan pemahaman serta memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan pilkada. KPUD Kota Bengkulu bersama jajarannya yaitu PPK dan PPS fokus melaksanakan tahapan dan program sosialisasi pilkada. Sedangkan pihak eksternal yang dijadikan mitra tetap seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, akademisi, pemuda dan mahasiswa fokus melaksanakan materi sosialisasi pilkada yang berkaitan dengan pendidikan pemilih mengenai isu pentingnya keikutsertaan dalam pilkada, nilai-nilai demokrasi dan dampak golput dalam pilkada. Sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menghadapi Pilkada 2024 Kota Bengkulu, perlu adanya sistem (cara) sosialisasi pilkada untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, dimana cara tersebut dilakukan melalui semua media yang bisa menjangkau lapisan masyarakat seperti menggunakan sosial media, facebook, instagram, dan youtube, bisa berupa podcast, bisa berupa bincang santai atau kopi murni, Kampanye Publik seperti melakukan kegiatan rapat umum, seminar, Pendekatan Komunitas, bahan cetak seperti poster dan spanduk yang bisa ditempatkan di lokasi strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat, secara langsung yaitu sosialisasi ditempat keramaian

Sasaran (target) sosialisasi pilkada KPU Kota Bengkulu adalah seluruh warga kota Bengkulu yang telah memiliki hak memilih kelompok dan individu dalam masyarakat yang penting untuk diberikan informasi dan edukasi dengan program Kurikulum pendidikan formal, Pelatihan dan workshop, Program pendidikan non-formal, sasaran pendidikan diberikan pada generasi muda, Masyarakat umum, Kelompok minoritas dan masyarakat marginal. Pemilihan pemula, keluarga, kelompok marginal, tokoh masyarakat dan agama serta pelajardan mahasiswa disabilitas, pemilih luar negeri, masyarakat umum.

Media sosialisasi pilkada KPUD Kota Bengkulu bahwa media sosialisasi pilkada sudah digunakan dengan baik, seperti menggunakan media online yakni dengan broadcas, fb, IG, poster dan lainnya yang dapat menyalurkan informasi dari KPUD Kota Bengkulu tersebut sampai kepada masyarakat. Media sosialisasi pilkada KPUD Kota Bengkulu sudah bagus dari sisi pelaksanaan tentang media yang dapat dipakai sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 dengan beberapa komponennya. Perencanaan dan pengorganisasian media sosialisasi pilkada yang digunakan harus dilakukan untuk memantapkan pemanfaatan media sosialisasi pilkada dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Waktu melakukan sosialisasi adalah sebelum pemilu, masa Pra-Kampanye, sesuai tahapan pilkada sampai menuju tanggal 27 November 2024, tempat pelaksanaan program pendidikan politik bagi pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Bengkulu dilakukan di sekolah-sekolah, Instansi-instansi, Tempat umum, Sosialisasi di hotel, kampus dll.

Melalui partisipasi mereka dapat memahami nilai dan norma politik serta meningkatkan kesadaran politik dikalangan masyarakat, menambah ilmu dalam dunia politik agar tidak salah dalam kegiatan tersebut, memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, lebih terinformasi tentang peristiwa dan isu terkini, menambah wawasan, relasi dan pengalamandengan bergabung dengan partai politik adalah salah satu cara untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik, dapat memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka sendiri serta kelompok mereka, memastikan bahwa suaramereka didengar dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan mengambil peran aktif dalam membentuk masyarakat yang lebih baik dapat mengembangkan keterampilan seperti kepemimpinan, komunikasi, negosiasi, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap saya maupun masyarakat seperti lebih memahami mekanisme pemilu sertamasyarakat dapat menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab membantu masyarakat memahami pentingnya partisipasi, politik dan pemilu, serta bagaimana proses politik mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, membantu menyukseskan pemilu, dan menjadi warga negara yang baik dengan ikut serta dalam menyukseskan pemilu, meningkatkan kesadaran politik dikalangan masyarakat dan ingin memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki



kondisi sosial dan politik, dapat terlibat dalam politik untuk berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang dapat mempengaruhi banyak orang.

Sosialisasi pemilu dan pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU sangat penting, karena melalui Pendidikan pemilu dapat membuat masyarakat menjadi cerdas dalam menentukan hak pilih dan dapat mengerti bahwa suara mereka sangatlah dibutuhkan bagi kemajuan bangsa ini, dengan mengikuti sosialisasi saya dapat membantu memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami, masyarakat lebih kritis dalam menyikapi informasi politik yang beredar dan dapat membedakan informasi yang benar atau salah. Amun tidak semua masyarakat yang memiliki pemikiran yang sama karena ada beberapa masyarakat yang tidak mau mengikuti sosialisasi dalam menghadapi pilkada ini dikarenakan tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam politik, dan terasa sangat rumit, meski mereka tidak mengikuti sosialisasi yang diberikan namun mereka tetap menggunakan hak pilih mereka dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih siapa saja yang menurut mereka pemimpin yang dapat dapat memajukan kkemakmuran rakyatnya terutama dalam pemilihan pemimpin daerah.

Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya pihak KPUD baik dari komisioner KPU, PPK dan PPS telah melakukan sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat, dimana sosialisasi yang diberikan memiliki materi, presentator, sistem (cara), sasaran, media waktu dan tempat sesuai dengan teori dari Asri Fahrihzal (2018) yang mengatakan bahwa efektivitas sosialisasi komisi pemilihan umum dapat dilihat dari adanya materi sosialisasi pilkada, persentator sosialisasi pilkada, sistem (cara) sosialisasi pilkada, sasaran (target) sosialisasi pilkada, media sosialisasi pilkada, waktu dan tempat sosialisasi pilkada. Dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat ikut berpartisipasi dalam menghadapi pilkada 2024 Kota Bengkulu. Hal ini didukung oleh teori Arniti (2020) bahwa partisipasi merupakan keterlibatan warga negarasecara individu dalam kegiatan politik. Segala kegiatanwarga negara yang mempengaruhi proses pembuatan sertapelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilihpemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagaikegiatan partisipasi politik. Partisipasi sebagai salah satubentuk efek politik dari sosialisasi politik atau komunikasipolitikKegiatan pemberian suara (voting) dianggap sebagai bentukpartisipasi politik aktif yang paling kecil, sebab hal itu akanberhenti jika pemberian suara sudah terlaksana. Sedangkanorang-orang apatis merupakan mereka yang tidakberpartisipasi dalam proses politik, ini disebabkan olehpilihan individu.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti :

1. Pihak KPUD baik dari komisioner KPU, PPK dan PPS telah melakukan sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat, dimana sosialisasi yang diberikan memiliki materi, presentator, sistem (cara), sasaran, media waktu dan tempat. Dimana materi sosialisasi pilkada terkait dengan dasar-dasar pemilu seperti pengertian dan pentingnya pemilu, proses pemilu, hak dan kewajibana pemilu, penjelasan tentang tahapan pemilu, termasuk pendaftaran pemilih, pemilihan calon, pemungutan suara kandidat dan partai politik,tanggal pemilu, cara memberikan suara, calon dan partai politik ajakan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan seperti bagaimana cara memilih, tahapan & jadwa pilkada, tanggal memilih, hak dan kewajiban pemilihadanya sistem (cara) sosialisasi pilkada untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat hal ini terbukti dengan keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pemilihan umum dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak suara sehingga mereka memberikan hak suara mereka dengan ikut serta memilih sesuai dengan pilihan hati nurani mereka.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui semua media yang bisa menjangkau lapisan masyarakat seperti menggunakan sosial media, facebook, instagram, dan youtube, bisa berupa podcact, bisa berupa bincang santai atau kopi murni, Kampanye Publik seperti melakukan kegiatan rapat umum, seminar, Pendekatan Komunitas, bahan cetak seperti poster dan spanduk yang bisa ditempatkan dilokasi strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat, secara lansung yaitu sosialisasi di tempat keramaian. Sasaran (target) sosialisasi pilkada KPU Kota Bengkulu adalah seluruh warga kota bengkulu yang telah memiliki hak memilih seperti menggunakan media online yakni dengan broadcas, fb, IG, poster dan lainnya yang dapat menyalurkan informasi dari KPUD Kota Bengkulu. Waktu melakukan sosialisasi adalah sebelum pemilu, masa Pra-Kampanye, sesuai tahapan pilkada sampai menuju tanggal 27 November 2024, tempat pelaksanaan program pendidikan politik bagi pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Bengkulu dilakukan di sekolah-sekolah, Instansi-instansi, Tempat umum, Sosialisasi di hotel, kampus. Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat ikut berpartisipasi hal demikian membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan dalam menghadapi pilkada sudah efektifdimana

efektivitas sosialisasi komisi pemilihan umum dapat dilihat dari adanya materi, presentator, sistem (cara), sasaran, media waktu dan tempat dalam bersosialisasi.

### Saran

1. KPUD Kota Bengkulu harus menjelaskan pentingnya pemutakhiran daftar pemilih dengan memberikan bimbingan teknis pemutakhiran daftar pemilih tetap agar tidak masuk kembali ke DPS atau DPT yang dikoordinasikan oleh PPS dan PPK masing-masing, KPUD Kota Bengkulu wajib melakukan sosialisasi kepada moderator pilkada dari dalam dan luar KKPU Kota Bengkulu. KPUD Kota Bengkulu beserta jajarannya yakni PPK dan PPS berkomitmen melaksanakan tahap dan rencana sosialisasi pilkada, Terdapat pengelolaan metode sosialisasi pemilu daerah (PPK dan PPS) yang baik di tingkat KPUD dan jajarannya di Kota Bengkulu, KPUD Kota Bengkulu harus menjadikan tujuan sosialisasi pilkada sebagai objek dan subjek pemberian materi sosialisasi pilkada. 5. KPUD Kota Bengkulu harus melakukan inovasi dan integrasi yang lebih baik dalam penggunaan media sosial untuk pilkada
2. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti sosialisasi yang diberikan dalam melakukan pemilihan umum yang baik dan benar, tidak golput sehingga dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin daerah menurut mereka yang dapat memimpin perkembangan dan kemajuan daerah/ kota Bengkulu

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Hadi Elyas. 2020. "Inovasi Model Peran Serta Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak Dalam Pemilu." *Jurnal Warta Edisi 63* Volume 14.
- ARIS. 2022. "Pengertian Sosialisasi: Fungsi, Tujuan, Dan Prosesnya." *Gramedia Blog*. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sosialisasi/> (June 5, 2024).
- Arniti. 2020. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 4* No. 2.
- Asri Fahrizal. 2018. "Efektivitas Sosialisasi Pilkada dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di kpud kota medan." Universitas muhammadiyah sumatera utara.
- Irsyad Sudirman and Imam Muazansyah. 2022. "Efektivitas Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Pada Pemilih Pemula Dalam Pemilu Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid 19." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* Vol. 5, No.2
- Khairatun uma daulay. 2021. "strategi humas komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pilkada bupati dan wakil bupati priode tahun 2020-2024 kabupaten labuhanbatu." Universitas islam negeri sumatra utara medan.
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mayasari, A. "KPU Bengkulu Melalui Kirab, Partisipasi Warga Dalam Pemilu Meningkat. Kota Bengkulu : Marboen, A.P." 2023.
- Miles & Huberman. 2019. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Mokhammad Samsul Arif. 2020. "Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 2 No.1
- Putri Ulandari. 2023. "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Serentak 2024." *Jurnal Of Social Science Reseach* Vol. 3, No.2
- Siagian, SP. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulfitri Husain. 2023. "Partisipasi Pemilih Melalui Desa Peduli Pemilu Pada Pemilihan 2024 Di Kota Palu." *Jurnal dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* Vol 21 No.2
- Vena Savera Syukriah. 2023. "Penyuluhan Hukum Tentang Pemilihan Umum Kedapa Pemilih Pemula SMA Madani Al-Aziziyah." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* Vol.10, No.1